

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketika reformasi digulirkan tahun 1997, muncul tuntutan yang kuat untuk membebaskan kendali pranata-pranata komunikasi dan informasi dari penguasa. Komunikasi yang didominasi dituntut menjadi pluralisasi yang bersifat atas – bawah (*top down*) menjadi lebih banyak bawah – atas (*bottom up*) ; informasi yang ‘memberdaya’ menjadi ‘memberdayakan’ ; yang pura-pura, menjadi informasi apa adanya dan sikap *monosemy* (makna tunggal) menjadi *polysemy* (kaya interpretasi). Masyarakat menghendaki kebebasan dalam komunikasi dan informasi serta adanya transparansi.

Bangsa Indonesia masih berada di tengah gelombang reformasi menuju masyarakat yang demokratis mandiri dan sejahtera. Berbagai perubahan terus terjadi dengan membawa berbagai dampak baik yang positif maupun negatif. Kran-kran komunikasi politikpun mulai terbuka, sebagai sebuah harapan baru bagi tegaknya demokrasi.

Upaya dalam mewujudkan tegaknya Demokrasi di Indonesia adalah dengan tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui kegiatan Partai Politik. Partai Politik merupakan sarana yang sangat penting arti, fungsi dan perannya sebagai perwujudan kemerdekaan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia, maka dari itu Partai Politik harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berdasarkan kedaulatan rakyat.

Salah satu fungsi yang dijalankan Partai Politik adalah sebagai sarana Komunikasi Politik untuk menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Penampungan dan penggabungan pendapat dan aspirasi masyarakat dinamakan “penggabungan kepentingan” (*Interest Agregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi tersebut dinamakan “perumusan kepentingan” (*Interest Articulation*). Semua itu dilakukan oleh Partai Politik, untuk kemudian dirumuskan sebagai program partai yang akan digunakan kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*Public Policy*). Dilain pihak Partai Politik yang berfungsi menyebarkan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus Informasi serta dialog dari atas ke bawah dan sebaliknya dimana Partai Politik sebagai penghubung.<sup>1</sup>

Dengan demikian maka perlu ditingkatkan kegiatan dan peranan Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan Politik serta dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang berorientasi kepada program-program pembangunan secara jujur, sehat dan bertanggung jawab demi terciptanya tujuan nasional.

Partai Politik juga merupakan salah satu wahana guna menyatakan dukungan atau tuntutan dalam proses politik. Semua dukungan itu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang diwujudkan melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara Demokrasi, jujur, adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

---

<sup>1</sup> Misi dan Fungsi Partai Politik, PT Gramedia, Jakarta, 1992, Hal. 163

Pemilihan umum setelah era Orde Baru runtuh kiranya menjadi suatu ajang perkembangan demokrasi secara cepat untuk mengadakan pemurnian dan pencucian makna demokrasi tersebut. Pemilu dengan sebutan pesta demokrasinya kian lama menjadikan wahana pemilu menjadi sempit yang pada akhirnya memasung keleluasaan artikulatif pemaknaan pemilu tersebut.

Pada prinsipnya pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai : *pertama*, kegiatan partisipatorik politik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak. *Kedua*, sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa politik kepanjangan tangan dimana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili masyarakat. Akibatnya muncul perlombaan make-up dalam mendapat simpati sebagai wujud representasi masyarakat luas. *Ketiga*, sirkulasi pada elit politik yang berujung pada perbaikan *performance* pelaksana eksekutifnya<sup>2</sup>

Memahami penjelasan pasal 35 UU Pilpres khususnya huruf (I) maka kampanye diartikan sebagai “*kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon*”

Dalam Kampanye politik di Indonesia, partai politik memang telah menampilkan “panggung depan”-nya dengan semarak, khususnya lewat unjuk kekuatan partai dalam bentuk arak-arakan di jalanan<sup>3</sup>.

Sebagai salah satu lembaga demokratis, partai politik berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan

---

<sup>2</sup> Tataq Chidmad, SH, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta 2004

<sup>3</sup> Dr. Deddy Mulyana, M.A, *Nuansa-Nuansa Komunikasi (Meneropong Politik dan Budaya*

kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang sesuai dengan mekanisme demokrasi. Karena partai politik merupakan sarana yang sangat penting arti, fungsi dan peranannya dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara Republik Indonesia, komunikasi politik menjadi bagian terpenting untuk menjaring opini publik yang akan menentukan sukses atau tidaknya partai.

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap organisasi. Dari pendapat beberapa ahli yang menjelaskan komunikasi, maka dapat diketahui bahwa komunikasi adalah suatu proses interaksi sosial antara satu orang dengan orang lain untuk menjalin suatu pengertian yang sama atas gagasan, pesan, ide, untuk merubah perilaku orang lain dalam mencapai tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini, studi kasus lebih dalam melihat Partai Keadilan Sejahtera khususnya DPW PKS DIY sebagai salah satu partai politik modern yang terorganisasir secara baik dan rapi. Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) adalah jelmaan baru dari Partai Keadilan (PK) yang tidak lolos electoral threshold pada Pemilihan Umum 1999. Meski akhirnya terbentur pada ketentuan undang-undang menyangkut ambang batas suara, namun kiprah partai baru ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

PK Sejahtera didirikan oleh kader Partai Keadilan dengan arahan dan dukungan penuh DPP Partai Keadilan dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya *electoral treshold* (ET) 2 % dalam Pemilu 2004. Karena Undang-undang Pemilu

Pemilu 2004 dengan wajah baru dengan nama Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini disimbolkan dengan dinyatakannya secara formal penggabungan PK ke dalam PK Sejahtera pada saat Deklarasi Keberadaan PK sejahtera di setiap jenjang struktur (dari DPP, DPW, DPD, DPC dan seterusnya). Tidak berlebihan bila menyebut PK Sejahtera sebagai partai yang fenomenal. Muncul tanpa tokoh nasional dan akar historis dalam debut pertamanya melalui PK pada Pemilu 1999, partai ini berhasil menduduki peringkat ketujuh dari 48 partai peserta Pemilu. PK berhasil mendulang suara 1,4 persen dan mendapat 7 kursi Dewan Perwakilan Rakyat, 21 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan sekitar 160 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemilu legislatif 2004, perolehan suara dan kursi PKS melonjak hampir 600%. Pada tahun 1999, secara keseluruhan PKS (PK waktu itu) DIY hanya mendapat 5 kursi legislatif, yakni 1 kursi DPRD Propinsi dan 4 kursi DPRD Kabupaten/Kota. Sementara, pada pemilu 2004 secara keseluruhan PKS DIY akhirnya mendapat 29 kursi legislatif, yakni 1 DPR pusat, 6 kursi DPRD Propinsi DIY, 6 kursi DPRD Sleman, 5 kursi DPRD Kota, 5 kursi DPRD Bantul, 4 kursi DPRD Kulon Progo, dan 2 DPRD Gunung Kidul. Berikut adalah tabel Perolehan Suara dan Komposisi Kursi DPR Kabupaten/Kota Se- DIY pada Pemilu 1999 dan 2004 :<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Laporan Tim Rencanangan Pemilu DPW PK Sejahtera DIY

Tabel 1.1

## Kursi Pemilu 1999

No	Partai	DATI II						Jumlah
		Kota Yogya	Bantul	Sleman	Gunung Kidul	Kulon Progo	Jumlah	
1	PDI-P	15	13	15	15	11	69	
2	PAN	9	7	8	5	5	34	
3	Golkar	4	5	5	9	6	29	
4	PPP	2	2	3	3	2	12	
5	PKB	2	8	6	4	7	27	
6	PBB	1	1	1	1	1	5	
7	PK	1	1	1	0	1	4	
8	PD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	
9	PKP	1	1	1	1	1	5	
10	KAMI	0	1	0	1	1	3	
11	PNI FM	0	1	0	1	0	2	
	Jumlah	35	40	40	40	35	188	

Tabel 1.2

## Kursi Pemilu 2004

No	Partai	DATI II						Jumlah
		Kota Yogya	Bantul	Sleman	Gunung Kidul	Kulon Progo	Jumlah	
1	PDI-P	11	16	10	11	7	55	
2	PAN	9	7	7	7	6	36	
3	Golkar	5	5	6	12	5	33	
4	PPP	1	3	4	2	2	12	
5	PKB	0	6	7	6	7	26	
6	PBB	0	0	0	2	0	2	
7	PKS	5	5	6	2	4	22	
8	PD	4	1	3	0	1	9	
9	PKPB	0	2	1	2	1	6	
10	PDS	0	0	1	0	0	1	
11	Patriot Pancasila	0	0	0	0	1	1	
12	Partai Merdeka	0	0	0	1	0	1	
13	PDK	0	0	0	0	1	1	
	Jumlah	35	45	45	45	35	205	

PEROLEHAN SUARA UNTUK DPR PUSAT

DALAM PEMILU 1999 DAN 2004

Tabel 1.3

Suara Pemilu 1999

No	Partai	Dati II					Jumlah
		Kota Yogya	Bantul	Sleman	Gunung Kidul	Kulon Progo	
1	PDI-P	93046	125618	189527	134,586	72559	615336
2	Golkar	25390	45210	61762	79,797	36898	249057
3	PPP	12933	26119	27601	12,132	10565	89350
4	PKB	11248	87861	73069	43,517	42000	257695
5	PAN	54599	71786	100832	38,152	33464	298833
6	PBB	4778	6652	8616	3,300	3272	26618
7	PD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD
8	PK	5227	6702	10609	2,624	3818	28980
9	PNI				2,709		2,709
10	KAMI				4,392		4,392
11	MASYUMI				3,111		3,111
12	PNI FM				3,372		3,372
13	IPKI				3,447		3,447
14	PKP				2,630		2,630

Tabel 1.4

Suara Pemilu 2004

No	Partai	Dati II					Jumlah
		Kota Yogya	Bantul	Sleman	Gunung Kidul	Kulon Progo	
1	PDI-P	60469	172797	120001	99,728	49587	502582
2	Golkar	23194	43503	58588	12,554	33384	261223
3	PPP	13096	23493	34697	12,923	11855	96064
4	PKB	6845	58547	67094	31,264	29650	193400

5	PAN	52174	84793	107553	57,534	38650	340704
6	PBB	3460	7856	6421	14,221	3526	35484
7	PD	21813	20651	40222	13,107	12751	108544
8	PKS	24193	33399	51486	16,587	15963	141628

PK Sejahtera berasaskan Islam dan memproklamirkan diri sebagai partai da'wah dalam pengertian seluas-luasnya. Sebagai partai politik, Partai Keadilan Sejahtera memandang komunikasi politik sebagai proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan. Dikarenakan komunikasi politik dilakukan dengan tujuan agar orang lain mau berpartisipasi dalam politik maka diperlukan beberapa kerangka dasar yang dapat dijadikan *guidance* para aktifis dalam komunikasi politik. Pembangunan Komunikasi Politik dengan;

- i. Penyadaran umum pentingnya sistem politik islami sebagai solusi terhadap persoalan bangsa dan negara.
- ii. Mengokohkan kredibilitas dan efektifitas komunikasi antara partai dan masyarakat.

Kemunculan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tidak langsung berperan mengubah sikap negatif terhadap Islam yang dipandang sebagai agama yang menghalangi demokrasi. PKS dipandang sebagai partai Islam yang ingin menyalurkan aspirasi umat islam lewat jalur demokrasi dan parlemen secara legal bukan lewat kekerasan dan jalur 'parlement jalanan', PKS tidak hanya mampu menghilangkan politik bahwa umat islam hanya mampu menyalurkan aspirasi



politiknya lewat anarkhi, tetapi PKS juga mampu menampilkan diri sebagai partai politik Islam yang santun dan bersih.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui proses komunikasi politik yang dijalankan oleh Partai Keadilan Sejahtera Periode 2003-2004 terlepas dari lebel partainya yang natebene berlandaskan agama dengan memfokuskan wilayah studi di DIY Karena kontribusi daerah ini dalam menarik simpatisan pada pemilu 2004 sangat besar.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses komunikasi Politik yang dijalankan oleh DPW PKS DIY tahun 2003-2004 ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses komunikasi politik di DPW PKS DIY?

## **C. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Partai Politik**

Untuk melihat lebih jauh peran dan fungsi dari Partai, khususnya disini penelitian pada Partai Keadilan Sejahtera. Dimana partai politik itu sendiri adalah suatu kelompok yang berorganisasi anggota-anggotanya mempunyai otoritas nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok ini berusaha untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Teori partai yang lain adalah :

1. Partai politik yang disampaikan oleh *Carl. J. Friedrich* partai politik adalah, sekelompok manusia yang berorganisasi secara setabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun materil<sup>5</sup>
2. Batasan menurut *Sigmurid Neumann* dalam bukunya *modern political porties* mengemukakan definisi partai politik adalah, organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda<sup>6</sup>.
3. Mark. N. Hagopian, mengemukakan partai politik adalah, suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideology tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi dalam pemilihan<sup>7</sup>.
4. Menurut Rusadi Kantaprawira, partai politik adalah, organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan bertugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideology, mempunyai program politik sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih praktamis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Meriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 161, mengutip Pendapat Carl. J. Friedrich.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 162, Mengutip Pendapat, Sigmund Newman.

<sup>7</sup> Mark N. Hgopian, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Editor Dr. Ichlasul Amal, Tiara Wacana, Yogyakarta.

<sup>8</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1988, hal. 63.

5. Partai politik menurut George B. DE hussar dan Thomas H. Stevenson, partai politik adalah, sekelompok orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggotanya dalam jabatan<sup>9</sup>.

Dengan melihat batasan-batasan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa partai politik itu merupakan suatu organisasi yang ada dalam suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan publik dengan cara menempatkan wakil-wakilnya untuk duduk dilembaga pemerintahan. Adapun cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan adalah dengan cara konstitusional, misalnya dengan cara partisipasi rakyat untuk ikut memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan umum. Disini peran partai politik sangatlah penting dalam proses penyelesaian calon-calon yang diajukan oleh partai politik, sehingga masyarakat akan memilih calon-calon yang dianggapnya mampu menyuarakan aspirasi rakyat.

#### **a. Asal Usul Partai Politik**

Pada awalnya Partai Politik lahir di Eropa barat tetapi kini mulai tumbuh mendunia, Partai Politik lahir karena semakin meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan kekuatan penuh yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik<sup>10</sup>.

Sejarah Partai Politik menurut Eddi Wibowo dan kawan-kawan, yaitu:<sup>11</sup>

Partai Politik jika ditelusuri dari sejarah pembentukannya, pertama-tama lahir di Negara-negara Eropa Barat. Bangkitnya gagasan yang menempatkan rakyat sebagai faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik,

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 43.

maka partai politik tumbuh dan berkembang secara natural menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Oleh karena itu, kehadiran politik di Negara-negara di seluruh belahan dunia dewasa ini bahkan di Negara yang masih baru berdiri, telah menjadi fenomena yang biasa dijumpai.

Pada permulaan perkembangannya di benua Eropa, seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik pada mulanya cenderung dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen yang cenderung bersifat elitis dan aristokratis, serta lebih kepada mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Berkembangnya kesadaran akan hak pilih yang semakin meluas, menjadikan kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen. Hal itu ditandai dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukung menjelang masa pemilihan umum. Gejala tersebut menunjukkan adanya kesadaran akan semakin perlunya diperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat. Selanjutnya kelompok-kelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha memperkembangkan organisasi massa yang pada ujungnya terbentuknya suatu jalinan hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik dalam parlemen dengan panitia-panitia pemilihan yang sepaham dan sekepentingan. Dari sinilah lahir partai politik

Di Negara-negara jajahan partai-partai politik sering didirikan dalam rangka pergerakan nasional di luar dewan perwakilan rakyat colonial, malahan partai-partai

kadang-kadang menolak untuk duduk dalam badan itu seperti pernah terjadi di India dan Hindia Belanda, setelah kemerdekaan dicapai dan dengan meluasnya proses urbanisasi, komunikasi massa serta pendidikan umum, maka bertambah kuatlah kecenderungan untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui partai.

#### **b. Fungsi partai Politik**

Dalam negara yang menganut azas demokrasi, partai politik memiliki beberapa fungsi menurut Hockshon fungsi partai politik itu ada empat yaitu : membuat nominasi, konteks dalam pemilu, melakukan kontrol dengan menduduki jabatan publik dan mengorganisasi pemerintah.

Prof. Miriam Budiarjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik mengatakan, fungsi partai politik itu ada empat yaitu :

##### **1. Sebagai Sarana komunikasi politik**

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat bekurang. Penampungan dan penggabungan pendapat dan aspirasi masyarakat dinamakan “Penggabungan Kepentingan” (*Interest Agregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi tersebut dinamakan “Perumusan Kepentingan” (*Interest Articulation*).

##### **2. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik**

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai, juga berusaha menarik golongan muda untuk menjadi kader yangdimasa mendatang akan

---

<sup>11</sup> Eddi Wibowo dkk, *Ilmu Politik Kontemporer*, YPAPI Yogyakarta, 2004, hal.65-67.

menggantikan pejabat dan pimpinan lama, dimana golongan muda merupakan generasi penerus.

### 3. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang biasanya berlaku dalam masyarakat dimana seseorang itu berada. Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai salah satu cara sosialisasi politik ini dimungkinkan bagi partai politik untuk memperoleh dukungan dari masyarakat melalui pemilihan umum dalam usaha menguasai pemerintahan.

### 4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam suasana Demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan persoalan yang wajar, jika sampai terjadi konflik, maka partai politik berusaha untuk mengatasinya<sup>12</sup>.

Adapun Fungsi Utama Partai politik yaitu :

1. Mengumpulkan, mengorganisir dan merumuskan aspirasi rakyat untuk diperhatikan oleh system politik.
2. Menempatkan wakil-wakil yang dipandang cakap untuk mewujudkan aspirasi rakyat.

### c. Sistem Kepartaian

Pada setiap Negara, sesudah jangka waktu yang cukup panjang, terdapat suatu tingkat stabilitas dalam sejumlah partai-partainya, yaitu pada struktur internal,

---

<sup>12</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 163.

ideology, bahkan pada ukuran besarnya partai itu sendiri, sekutu-sekutunya, dan tipe-tipe oposisinya. Karena itu, kita dapat menjelaskan “sistem kepartaian” dari Negara manapun dalam suatu jangka waktu tertentu, suatu studi komparatif mengenai berbagai sistem-sistem partai mengungkapkan persamaan-persamaan tertentu yang menonjol ; dengan demikian kita dapat melukiskan jenis-jenis sistem yang tampaknya mempunyai pengaruh yang besar pada struktur dan cara kerja rezim-rezim politik. Klasifikasi pada umumnya diambil pada hubungan ini yang membedakan system partai yang pluralistis dari system partai tunggal. Tetapi pikiran dasar dari sebuah “partai dominant” adalah merupakan suatu jembatan antara system partai pluralistis dan sistem partai tunggal

Dalam suatu system partai pluralistis, setidaknya-tidaknnya terdapat dua partai di dalamnya, tanpa ada yang mengalami superioritas atas yang lainnya. Bila ada yang sebelumnya sudah lebih berkuasa, maka ia langsung menjadi “system partai yang dominan“. Dalam sistem partai pluralistis, suatu perbedaan dasar terlihat antara sistem dua partai dan sistem multi-partai, yang didasarkan pada perbedaan cara kerja dalam institusi yang demokratis.

Karena itu perbedaan antara sistem dua partai dan banyak partai mulai sangat penting, tetapi hal ini tidak boleh dilebih-lebihkan. Karena pembentukan persekutuan partai yang reguler ketika memasuki pertarungan pemilihan dengan program khusus yang disetujui bersama dan bekerjasama dalam hal pelaksanaannya membuat sistem multi partai kelihatannya sama dengan sistem dua partai. Sebaliknya, bila masing-masing terlampau fleksibel, bila tidak ada pemungutan suara yang disiplin di parlemen, maka mayoritas pemerintahan akan goyah dan tidak stabil dan suatu

system dua partai akan menyerupai sistem multi partai. Suatu "sistem dua partai yang fleksibel" sebenarnya lebih banyak mendekati sistem multi partai daripada "sistem dua partai yang kaku" seperti tipe sistem partai di Britania<sup>13</sup>.

Partai politik menurut Maurice Duverger dalam buku *Partai Politik* suatu tinjauan umum oleh Drs. Haryanto dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu<sup>14</sup>:

#### **Sistem Partai Tunggal (one party system)**

Sistem satu partai atau one-party adalah sistem yang menunjukkan kepada kita bahwa di suatu negara hanya terdapat satu partai politik yang dominan, dalam arti partai politik tersebut memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik di Negara dimana dia berada.

Partai Politik yang ada di Negara yang menganut system Satu partai mungkin memang benar-benar merupakan satu-satunya partai politik yang ada di Negara tersebut, tetapi mungkin pula di samping partai politik tersebut di Negara itu masih terdapat beberapa partai politik yang tidak mempunyai peranan penting dalam kehidupan politik. Partai-partai politik itu merupakan partai-partai politik kecil yang keberadaannya dapat dinyatakan tidak mutlak. Adapun pengertiannya, seandainya partai-partai politik itu tidak ada, kehidupan politik di Negara yang bersangkutan tidak akan terpengaruh.

Pada umumnya sistem satu partai dianut oleh Negara-negara yang baru merdeka, tetapi disamping itu system satu partai dianut pula oleh Negara-negara yang sudah cukup lama merdeka. Kecenderungan sistem satu partai dianut oleh

---

<sup>13</sup> Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, PT. Bina Aksara, 1984, Hal.21

<sup>14</sup> Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hal. 47-75.



kebanyakan Negara-negara yang baru merdeka disebabkan oleh karena di Negara-negara baru pimpinan sering dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah serta suku bangsa yang berbeda corak social dan pandangan hidupnya. Dengan seringnya para pimpinan dihadapkan pada permasalahan yang seperti itu, pada umumnya diambil langkah dengan dianutnya sistem satu partai untuk mengatasinya. Dengan dianutnya sistem satu partai diharapkan pengintegrasian berbagai golongan, daerah serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya dapat segera dilaksanakan.

Di Negara-negara yang menganut system satu partai, pada umumnya tidak dijumpai adanya persaingan. Adapun yang dimaksudkan dengan persaingan di sini adalah persaingan yang berlangsung di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Tidak dijumpai persaingan di Negara-negara tersebut disebabkan oleh karena partai politik yang ada merupakan satu-satunya kekuatan politik yang diperbolehkan hidup. Dan seandainya di Negara-negara tersebut, disamping partai politik yang merupakan kekuatan politik yang besar dan dominan, terdapat pula kekuatan-kekuatan politik lainnya yang pada umumnya berwujud partai-partai politik kecil yang tidak dominan, maka kekuatan-kekuatan politik lainnya itu kurang atau bahkan tidak mampu untuk bersaing dengan partai politik yang besar dan dominan. Seandainya kekuatan-kekuatan politik lainnya tersebut benar-benar terdapat di Negara yang menganut system satu partai, maka kekuatan-kekuatan politik itu senang ataupun tidak senang harus menerima dominasi dan tunduk pada partai politik yang besar.

### **Sistem Dua Partai (two party system)**

Sistem dua partai menunjukkan kepada kita bahwa di suatu Negara hanya terdapat dua partai politik yang dominan. Adapun pengertiannya hanya kedua partai politik itu saja yang memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik di Negara dimana keduanya berada.

Akan tetapi disamping kedua partai politik yang memainkan peranan yang dominant tadi, di dalam Negara tersebut kemungkinan besar masih terdapat beberapa partai politik yang lainnya yang merupakan partai-partai politik kecil yang kurang atau bahkan tidak memainkan peranan yang dominant dalam kehidupan politik di Negara yang bersangkutan. Seandainya partai-partai politik yang kecil dan kurang atau bahkan tidak memainkan peranan yang dominant tersebut ditiadakan atau tidak ada sama sekali, maka kehidupan politik di Negara tersebut tidak akan terpengaruh. Hal ini disebabkan oleh karena kehidupan politik di Negara tersebut hanya tergantung kepada dua partai politik yang memainkan peranan yang dominan.

Apabila kita mengikuti pengertian yang menyatakan bahwa sistem dua partai menunjukkan adanya dua partai politik yang memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik, maka kita dapat dengan segera menyatakan bahwa di Negara tersebut berlaku sistem dua partai. Akan tetapi apabila pada suatu kurun waktu tertentu salah satu partai politik yang kecil yang kurang atau tidak mempunyai peranan dan pengaruh yang dominan dalam kehidupan politik, dapat merubah dirinya menjadi partai politik yang cukup disegani dan perlu diperhatikan oleh kedua partai yang memainkan peranan yang dominan, maka masih dapatkah atau masih tepatkah untuk menyebut bahwa di Negara tersebut berlaku system dua partai?

Dalam keadaan yang seperti ini, dimana partai politik yang kecil mulai berpengaruh, cukup sulit bagi kita untuk tetap menyatakan bahwa di Negara tersebut berlaku sistem dua partai.

Sistem dua partai, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Maurice Duverger, mempunyai kecenderungan diperkuat dengan dipergunakannya system pemilihan yang berdasarkan pada sistem distrik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa system pemilihan yang berdasarkan pada system distrik mengisyaratkan pada setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu orang wakil saja, oleh karena itu sistem pemilihan ini tidak mendorong tumbuhnya partai politik baru, sehingga dengan demikian akan memperkuat sistem dua partai yang sudah ada.

Dalam kaitannya dengan stabilitas, ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem dua partai cenderung untuk menunjang stabilitas politik di Negara yang menganut sistem tersebut. Kecenderungan bahwa sistem dua partai akan menunjang stabilitas politik terlihat dengan cukup jelas apabila kita membandingkannya dengan sistem banyak partai, hal ini disebabkan oleh karena sistem banyak partai dianggap menunjang instabilitas atau ketidakstabilan di Negara yang menganutnya. Akan tetapi pendapat tersebut masih perlu dibuktikan kebenarannya, benarkah sistem dua partai akan menunjang stabilitas politik dan sebaliknya benarkah sistem banyak partai akan mendorong ke arah ketidakstabilan politik yang menganutnya?

Sebagaimana telah disinggung sistem dua partai mengisyaratkan bahwa di dalam suatu Negara yang menganutnya hanya terdapat dua partai politik yang memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik di Negara tersebut. Kedua partai yang mendominasi kehidupan politik tersebut akan saling bersaing

untuk mendapatkan kekuasaan yang sebesar mungkin Partai politik yang satu dalam persaingan itu akan berusaha untuk dapat mengungguli partai politik yang lainnya dalam hal mendapatkan kekuasaan. Persaingan yang tampak sangat jelas diantara dua partai politik tersebut adalah pada saat diselenggarakannya pemilihan umum. Sebagaimana kita ketahui pemilihan umum adalah merupakan salah satu sarana untuk menentukan partai politik yang manakah yang akan mendapatkan kekuasaan yang paling besar di Negara yang bersangkutan. Pada saat berlangsungnya pemilihan umum, kedua partai politik yang saling bersaing itu akan berlomba untuk mendapatkan suara yang sebanyak mungkin, hal ini disebabkan karena jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik akan menentukan apakah bersangkutan akan keluar sebagai pemenang dalam persaingan itu. Partai politik yang memperoleh jumlah suara yang lebih banyak akan keluar sebagai pemenang, dan hal ini berarti partai politik tersebut pada gilirannya akan mendapatkan kekuasaan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan kekuasaan yang didapat partai politik yang lainnya.

### **Sistem Multi Partai**

Sistem banyak partai menunjukkan kepada kita bahwa di suatu Negara terdapat partai politik yang jumlahnya lebih dari dua. Partai-partai politik tersebut memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik di Negara dimana mereka berada.

Pada umumnya Negara yang menganut system banyak partai adalah Negara yang masyarakatnya bersifat majemuk. Kemajemukan masyarakat dapat ditunjukkan dengan terdapatnya bermacam-macam perbedaan sosial, seperti ras, suku, agama atau status, dengan adanya kemajemukan masyarakat seperti itu maka golongan-golongan dalam masyarakat akan lebih cenderung untuk menyalurkan

loyalitas mereka ke organisasi yang sesuai dengan ikatan primordialnya daripada bergabung dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda orientasinya. Misalnya di suatu Negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa biasanya terjadi pengkotak-kotakan warga Negara sesuai dengan sukunya darimana yang bersangkutan berasal, dan setiap warga Negara dengan sendirinya akan lebih bersikap loyal terhadap sukunya daripada suku-suku yang lainnya. Sebagai akibat lebih lanjut, di Negara tersebut kemungkinan besar akan terbentuk organisasi-organisasi yang didasarkan pada suku, dan warga Negara dengan sendirinya akan masuk menjadi anggota organisasi yang didirikan oleh sukunya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidaklah mengherankan apabila di Negara yang masyarakatnya bersifat majemuk mempunyai banyak partai politik. Dimana partai-partai politik yang ada di negara itu pada umumnya didirikan atas dasar pelapisan atau perbedaan sosial yang ada pada masyarakat yang bersangkutan, seperti atas dasar kesukuan, agama, status social, dan lain-lainnya.

#### **d. Tipologi Partai Politik**

Tipologi partai politik menurut Ramlan Surbakti, yaitu,<sup>15</sup>

Tipologi partai adalah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan Kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Klasifikasi ini cenderung bersifat tipe ideal karena dalam kenyataan tidak sepenuhnya demikian. Tetapi untuk tujuan memudahkan

---

<sup>15</sup> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992, hal 121-123.

pemahaman, tipologi ini sangat berguna. Sejumlah tipologi partai politik menurut kriteria-kriteria tersebut adalah :

a. Asas dan Orientasi

Berdasarkan asas dan orientasinya partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe, ketiga tipe itu adalah meliputi partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan.

Yang dimaksud partai politik pragmatis adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada satu doktrin dan ideology tertentu. Artinya perubahan waktu, situasi, dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai politik tersebut. Penampilan partai politik pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Partai ini biasanya terorganisasikan secara agak longgar. Hal ini tidak berarti partai politik pragmatis tidak memiliki ideology sebagai identitasnya.

Yang dimaksud dengan partai politik doktriner adalah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkrit sebagai penjabaran ideology-ideologi yang dimaksud adalah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara jelas dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh partai. Pengertian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideology partai sudah dirumuskan secara jelas dan partai ini terorganisasikan secara ketat.

Partai politik kepentingan merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, partai ini sering ditemui dalam sistem dua partai bersaing namun tidak mampu mengakomodasikan sejumlah kepentingan dalam masyarakat.

#### b. Komposisi dan Fungsi Anggota

Partai politik dapat digolongkan menjadi dua menurut komposisi dan fungsi anggotanya, yaitu partai massa dan partai kader.

Partai massa adalah partai politik yang mengendalikan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dengan mudah dimenangkan dan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakatnya dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan tujuan-tujuan tertentu. Partai ini seringkali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang pada umumnya bersifat sangat umum.

Partai kader adalah suatu partai guna mengandalkan kualitas anggota, kekuatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi anggota dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta struktur organisasi partai ini sangat hirarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Karena sifatnya yang demikian maka partai kader disebut juga partai yang sangat elitis.

c. Basis Sosial dan Tujuan

Partai politik berdasarkan basis sosial dapat dibagi menjadi empat tipe: *Pertama*, partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah.

*Kedua*, partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh dan pengusaha. *Ketiga*, partai politik yang anggotanya mempunyai pemeluk agama tertentu. Keempat, partai politik bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.

Dalam kenyataannya, kebanyakan partai politik tidak hanya mempunyai basis sosial dari kalangan tertentu, tetapi juga dari berbagai kalangan dengan satu atau dua kelompok sebagai pihak yang dominan.

Berdasarkan tujuan, partai politik dibagi menjadi tiga: partai perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.

Partai pembinaan bangsa, artinya partai politik yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan yang sempit.

Partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai ini cenderung bersifat monopolistis karena hanya satu partai dalam masyarakat.

**e. Politik Islam dan Partai Islam**

Menurut Guilain Denoeux, dalam tulisannya *The Forgotten Swamp : Navigating Political Islam, Middle East Policy*, vol. 9 juni 2002, menyebutkan



bahwa yang dimaksud dengan politik Islam adalah bentuk gerakan yang dilancarkan oleh individu, kelompok atau organisasi yang mempunyai tujuan politik atas nama islam. Artinya, semua gerakan baik itu yang radikal, moderat atau liberal sekalipun, ketika memperjuangkan kepentingan politiknya mengatasnamakan Islam. Sebagaimana Islam yang mempunyai banyak variasi interpretasi yang melahirkan berbagai macam mazhab dan pemikiran dari yang tekstualis-literalis sampai yang kontekstualis-nonliteral, gerakan politik Islam juga mempunyai wajah yang variatif. Hal ini wajar karena masing-masing gerakan politik islam di dunia merupakan respons masyarakat muslim lokal terhadap perkembangan sosio-politik yang mengitarinya. Karena itu tak heran kalau gerakan politik Islam di negara-negara Timur Tengah misalkan, tidak sama disamakan dengan gerakan politik Islam di Eropa akan berbeda dengan gerakan yang sama di benua lain, karena memang situasi sosio-politik dan tantangan yang dihadapinya berlainan<sup>16</sup>

Perkembangan politik Islam di Indonesia senantiasa menjadi pusat perhatian yang menarik, baik di dalam maupun luar negeri. Terlebih lagi, fenomena desakan penerapan syariat Islam dan amandemen Pasal 29 UUD 1945 belum juga selesai diperbincangkan dan diperjuangkan oleh sebagian ormas dan partai yang berasaskan Islam. Penolakan mayoritas anggota DPR terhadap amandemen Pasal 29 dan keterpecahan opini masyarakat terhadap penerapan syariat Islam secara Formal, banyak dianggap sebagai kegagalan politik Islam. Jika diperhatikan, politik Islam Indonesia memang banyak yang bercorak formalistik dan jauh dari substansi. Konflik kepentingan dan pandangan yang berbuntut pada perpecahan banyak terjadi

---

<sup>16</sup> dikutip dari <http://www.dataphone.se/~ahmad/990113.htm>

di tubuh partai politik Islam atau yang berbasis umat Islam. Perpecahan dan konflik di tubuh PPP, PKB, PAN, dan PBB. Belum lama ini adalah fakta yang tak terbantahkan. PPP dan PBB yang pernah mengharamkan pemimpin wanita, namun setelah diberi jatah kekuasaan menjadi diam, menunjukkan bahwa dalam politik umat Islam hanya dijadikan bumper kekuasaan elite partai<sup>17</sup>

Partai agama adalah partai yang terkadang menginterpretasikan kekuasaan dengan doktrin agama. Jadi, sumbernya bersandar pada hak Tuhan atau pada ketentuan agama, yang membentuk pilar berupa apa yang disebut dengan teokrasi, yang juga berdiri atas dasar yang sama dan tidak berdasar atas persetujuan rakyat<sup>18</sup>

Partai Islam adalah Partai yang menciptakan konsep peradaban yang membentuk realitas berdasarkan ajaran-ajaran Islam<sup>19</sup>

Menurut Azra sebuah Partai dapat disebut Islami apabila:

1. Partai yang menggunakan Islam sebagai Ideologi mereka
2. Yang menggunakan Pancasila sebagai dasar Ideologinya, tetapi pada saat yang sama menggunakan simbol-simbol Islam<sup>20</sup>

## **2. Pemilihan Umum**

### **a. Sistem Pemilihan**

Sistem pemilihan sebagai salah satu alat rekayasa konstitusional yang bermanfaat untuk mengurangi konflik ditengah masyarakat yang masih terpecah-pecah. Pentingnya sistem pemilihan juga disebabkan bertindak sebagai saluran yang

---

<sup>17</sup> <http://www.polarhome.com/pipermail/Nusantara/2002-November/000621.html>.

<sup>18</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Penerbit Mizan, 1996, hal 405

<sup>19</sup> *ibid*, hal. 405

melaluinya warga Negara dapat menuntut pertanggung jawaban dari para wakil terpilih mereka. Sedemikian strategis dan pentingnya suatu sistem pemilihan sehingga system pemilihan telah menjadi disiplin tersendiri dalam ilmu politik, walaupun di Indonesia belum diapresiasi dengan baik.

Menurut Ben Reilly (1999), pada intinya sistem pemilihan dirancang untuk memenuhi tiga hal <sup>21</sup>. *Pertama*, menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum menjadi kursi di badan-badan legislatife. Sistem tersebut mungkin bisa memberikan bobot lebih pada proporsionalitas jumlah suara yang diraih dengan jumlah kursi yang dimenangkan, atau mungkin pula bisa menyalurkan suara (betapapun terpecahnya keadaan partai) ke parlemen yang terdiri dari dua kutub partai-partai besar yang mewakili sudut pandang berbeda. *Kedua*, sistem pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji wakil-wakil yang telah mereka pilih.

*Ketiga*, sistem pemilu memberi dorongan terhadap pihak-pihak yang saling bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama. Dalam masyarakat yang terbelah secara etnis, misalnya system pemilihan tertentu bisa menghasilkan kandidat dari partai yang memperlihatkan sikap kooperatif, akomodatif terhadap kelompok pesaing, atau sebaliknya dapat menghukum kandidat dengan menghasilkan dukungan kepada pihak-pihak yang sejalan dengan kelompok etnis mereka.

---

<sup>20</sup> Azyumardi Azra, dikutip oleh Bahrul ulum, Bodohnya NU apa NU dibodohi, Ar-ruzz Press, 2002, hal. 144-145

<sup>21</sup> Ben Reilly, *Reformasi Pemilu di Indonesia, Dalam Almanak Parpol Indonesia*, (API, Jakarta 1999)

Kajian ilmu politik terhadap sistem pemilihan berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan variasi sistem yang pada intinya sistem-sistem pemilihan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar. Hal prinsip yang membedakan kelompok-kelompok sistem tersebut terletak pada seberapa dekat system itu menerjemahkan suara yang diperoleh secara nasional menjadi kursi parlemen yang dimenangkan, atau seberapa tinggi derajat proporsionalitasnya<sup>22</sup>.

#### 1. Sistem Pluralitas-Minoritas.

Sistem ini terdiri dari dua sistem pluralitas, yaitu *First Past The Post* (FPTP) dan Suara Blok (*Block Vote*, BV), serta dua sistem mayoritas, yakni Suara Alternatif (*Alternative Vote*, AV) dan Sistem Dua Babak (*Two Round System*, TRS). Dalam FPTP, pemilihan diselenggarakan dalam satu distrik (*single-member district*) dan pemenangnya adalah kandidat yang meraih jumlah suara terbanyak dan tidak harus meraih suara mayoritas. Sistem BV merupakan penerapan FPTP pada arus banyak tingkat (*multi-member district*) dan bukan pada distrik dengan suara tunggal (*single-member district*). Sedangkan *Party Block* merupakan variasi BV, dimana pemilih memilih partai bukan calon, dan partai yang memperoleh suara terbanyak memperoleh semua kursi distrik. Dalam AV terbuka kemungkinan pemilih membuat ranking calon secara urut menurut pilihan mereka, dengan menuliskan angka "1" untuk calon favorit, "2" untuk pilihan kedua, "3" untuk pilihan ketiga, dan seterusnya. Adapun TRS adalah pemilihan dalam dua babak. Jika seseorang memperoleh mayoritas suara absolute, dilangsung terpilih tanpa pemilihan

---

<sup>22</sup> Joko. J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi demokrasi*. (LP2I Press 2004).

tahap kedua, seperti dalam FPTP. Tetapi kalau tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas, babak kedua pemungutan dilakukan, dan pemenangnya yang dinyatakan kandidat terpilih.

## 2. Sistem Semi Proporsional

Sistem ini didasarkan pada terjemahan jumlah suara yang diperoleh menjadi kursi yang dimenangkan dengan cara-cara yang ada diantara proporsionalitas sistem proporsional dan kemayoritasan sistem pluralis mayoritas.

Sistem ini terdiri dari dua, yakni suara tunggal yang tidak dapat dialihkan (*Single Non-Transferable Votes*, SNTV) dan sistem campuran (*Mixed*). Dalam SNTV, pemilih berhak atas satu suara, tapi karena ada beberapa kursi yang harus diisi dalam satu distrik. Kandidat dengan suara terbanyaklah yang akan menduduki posisi-posisi ini. Sistem campuran menggunakan daftar PR (*Proportional Representation*) maupun distrik-distrik dengan suara tunggal (*Single Member District*) secara berdampingan. Sebagian anggota parlemen dipilih secara proporsional, sebagian lagi dengan beberapa jenis pluralitas atau mayoritas.

## 3. Sistem Perwakilan Proporsional.

Sistem PR (*Proportional Representation System*) ini didesain untuk mengurangi ketimpangan antara jatah suara nasional suatu partai dengan jatah kursi diparlemen. Variasi dari sistem ini adalah Sistem Daftar PR, Sistem Proporsional Campuran (*Mixed Member Proportional*, MMP), dan *Single*

---

*Transferable Vote* menggunakan distrik-distrik bersuara banyak (*Multi Member District*)

Sistem Daftar PR merupakan pemilihan perwakilan proporsional yang paling umum. Daftar PR mengharuskan partai menampilkan daftar calon didepan pemilih, dan pemilih menentukan pilihannya pada partai, bukan calon. Sistem Proporsional Campuran mencoba menggabungkan kelebihan sistem mayoritas dan PR. Proporsi parlemen dipilih dengan metode pluralitas mayoritas, biasanya dari distrik-distrik suara tunggal, sementara sisanya menggunakan daftar PR. Sedangkan dalam *Single Transferable Vote* menggunakan distrik-distrik bersuara banyak (*Multi Member District*), pemilih memilih calon berdasarkan ranking nomor urut pilihan di atas kertas suara dengan cara sama seperti AV. Setiap calon yang mempunyai lebih banyak suara daripada jatah yang ada langsung jadi.

#### **b. Sistem Pemilu 2004**

##### **1. Memilih DPR dan DPD**

Dalam amandemen keempat UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan penggunaan sistem perwakilan bikameral. Karena itulah dalam pemilu 2004, pemilih tidak hanya memilih anggota DPR namun juga anggota DPD . Inilah komposisi yang diharapkan benar-benar mewakili rakyat Indonesia. DPR adalah wujud keterwakilan (*Representation of Ideas*), sedangkan DPD adalah keterwakilan dalam kehadiran (*Representation in Presence*). Kursi DPR yang diperebutkan mencapai 550 kursi sedangkan DPD paling banyak sepertiga jumlah DPR. Saat ini ada 31 provinsi, tiap provinsi

ada 4 kursi DPD yang diperebutkan sehingga jumlah DPD kelak sebanyak 124 kursi. Dengan pemilihan anggota DPR dan DPD diharapkan parlemen yang terbentuk pasca pemilu 2004 adalah cermin bangsa yang dapat melihat, merasa berfikir dan bertindak dengan cara yang mencerminkan rakyat secara keseuruhan atau disebut *representative deskriptif (Representation Descriptive)*<sup>23</sup>.

## 2. Sistem Pemilu Ideal.

Berbicara tentang sistem pemilu yang ideal adalah sebuah wacana menarik, sebab selama ini sistem pemilu yang tumbuh berkembang di Dunia belum ada yang mutlak dikatakan sempurna. Namun yang terjadi adalah sistem pemilu yang diterapkan di setiap Negara hanya mengarah kepada titik ideal sebuah sistem pemilihan dengan karakteristik Negara sebagai tempat berlakunya sistem tersebut.

Demikian pula halnya di Indonesia, sistem pemilu yang dianut sudah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang. Meskipun demikian, sistem pemilu yang ada sekarang ini tetap saja memiliki kekurangan dan kelebihan. Menurut Ramlan Surbakti ada tiga tujuan dalam pemilihan umum<sup>24</sup>. *Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum (*public policy*). *Kedua*, pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 27

*Ketiga*, pemilu merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Ketiga tujuan itu akan dapat dicapai jika sistem pemilu yang dipilih tepat dan *favorable*. Istilah tepat dan *favorable* merujuk pada kenyataan bahwa tidak ada sistem pemilu yang ideal untuk setiap kondisi. Sistem pemilu yang cocok di Jepang dan Philipina, walaupun sama-sama Negara kepulauan, belum tentu cocok dengan kondisi di Indonesia, Inggris yang dikenal sebagai Negara asal sistem distrik, kini masyarakatnya mendesak diadakan referendum untuk menentukan perubahan sistem pemilu<sup>25</sup>

### 3. Komunikasi Politik

Hubungan antara komunikasi dengan politik merupakan dua disiplin ilmu yang sama-sama tergolong dalam ilmu-ilmu sosial yang saling terkait satu sama lain, karena didalam kawasan politik, proses komunikasi menempati fungsi yang fundamental.

Istilah komunikasi politik mulai banyak disebut sejak tahun 1960-an ketika Gabriel Almond menerbitkan bukunya "The Politics of Development Are", dimana dia menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap system politik<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Rainlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta Grasindo, 1992) hal. 181-182.

<sup>25</sup> Benjuino Theodore, *Sistem Pemilu Ideal*, (Pemilu Indonesia Online) dalam Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. (LP2I Press Semarang 2003) hal. 20.

<sup>26</sup> Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, AIPi dan Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 7.



Hubungan antara komunikasi dengan politik dapat diulas dengan melihat :

- Bagaimana interaksi kedua disiplin ini dibidang teori dan perkembangan konsep-konsep
- Hubungan diantara kedua bidang itu dalam kehidupan yang nyata<sup>27</sup>.

Komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam setiap organisasi. Untuk mendapat kejelasan mengenai pengertian komunikasi, beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai hal tersebut diantaranya sebagai berikut :

Kata Komunikasi berasal dari bahasa Latin *communis* yang kemudian dalam Inggris berbunyi *communis* yang kemudian dalam bahasa Inggris berbunyi *common* berarti menjadikan sesuatu (dalam hal ini pesan ataupun informasi) sebagai pengetahuan atau pengertian bersama. Ketika terjadi komunikasi, pada dasarnya adalah suatu usaha untuk menegakkan “kebersamaan” dengan pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut<sup>28</sup>.

Menurut Carl I. Hovland, batasan komunikasi adalah “proses untuk membentuk atau mengubah perilaku orang lain”. Sedangkan menurut Harold D. Lasswell, komunikasi adalah “proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu “(*Who says what, in Which channel, to whom, with, what effect*)”<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Zulkarimein Nasution, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

<sup>28</sup> Ibid, hal. 41.

<sup>29</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik : Komunikator, pesan dan Media*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal.13.

Pengertian komunikasi politik secara umum adalah “Proses penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan dalam arti yang luas”<sup>30</sup>. Sedangkan dalam arti yang luas komunikasi politik adalah “Proses komunikasi politik tersebut dapat terjadi disemua lapisan masyarakat dan melalui saluran apa saja yang tersedia serta dapat dipergunakan”<sup>31</sup>.

Politik, seperti komunikasi, adalah proses, dan seperti komunikasi, politik melibatkan pembicaraan. Ini bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam yang lebih inklusif, yang berarti segala cara orang bertukar symbol. Ilmuwan politik Mark Roedolf mengatakan dengan cara sederhana, “Politik adalah pembicaraan, atau lebih tepat, kegiatan politik adalah berbicara”<sup>32</sup>.

#### a. Proses Komunikasi Politik

Dalam setiap peristiwa komunikasi terdapat tiga unsur yang memungkinkan berlangsungnya suatu proses komunikasi, yaitu : sumber (*source*), pesan (*message*) dan penerima (*destination*). Sumber yang disebut juga sebagai *komunikator* atau *pengirim*, merupakan pihak yang memulai atau memprakarsai suatu komunikasi, dalam hal ini yang menjadi komunikator disini adalah Partai Keadilan Sejahtera DIY baik yang diwakili oleh orang perorang (*individual*) ataupun suatu organisasi komunikasi yang terdiri dari beberapa atau banyak orang.

Komunikator disini disamakan dengan yang berlaku pada peristiwa komunikasi yang lain, yaitu pihak yang memprakarsai (yang bertindak sebagai

---

<sup>30</sup> Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, AIPI dan Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 7.

<sup>31</sup> Ibid.

sumber) penyampaian pesan kepada pihak lain. Komunikator, yang juga disebut *source*, *encoder*, *sender*, atau *actor*, menurut Blake dan Haroldsen, mencerminkan pihak yang memulai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi<sup>33</sup>. Sedangkan pesan (*content*) merupakan suatu informasi/pengetahuan/ide/maksud hati dan sebagainya, yang disampaikan melalui proses komunikasi dimaksud. Penerima yang juga disebut *komunikan* atau *audience* (khalayak) merupakan pihak yang dituju dalam proses komunikasi tersebut, atau yang dimaksudkan sebagai penerima informasi atau apa pun yang disampaikan melalui komunikasi yang dilakukan oleh sumber.

Tipe-tipe orang, politikus, professional dan aktivis yang memainkan peran kepemimpinan dalam komunikasi politik. Politikus, baik representative maupun ideology, berkomunikasi untuk kepentingan para pemilih atau untuk kepentingan tujuan. Juru bicara kelompok terorganisasi dan pemuka pendapat memainkan peran yang jauh lebih aktif dalam komunikasi politik dibandingkan dengan warga Negara pada umumnya<sup>34</sup>.

Unsur lain dalam peristiwa komunikasi adalah umpan balik (*feed-back*) yaitu respon atau tanggapan pihak penerima terhadap pesan ataupun informasi yang diperolehnya, yang disampaikan kepada pihak sumber. Dari umpan balik inilah sumber dapat mengetahui, apakah pesan yang disampaikan telah diterima (termasuk apakah pesan itu telah dicerna dengan tepat) dan bagaimana reaksi penerima terhadap pesan yang dimaksud.

---

<sup>32</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik : Komunikator, pesan dan Media*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 8.

<sup>33</sup> Nasution Zulkarimein, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 43.

<sup>34</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik*, Khalayak dan Efek, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, al.125.

Sebuah proses tidaklah akan selalu berjalan dengan mulus, yang artinya proses komunikasi politik sebagai sarana komunikasi politik partai juga menemui faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik yang sifatnya mendukung maupun hambatan.

Adapun Faktor-faktor Yang Mempengaruhi proses komunikasi politik DPW PKS DIY dalam pemenangan pemilu 2004 adalah sebagai berikut <sup>35</sup>:

a. Penokohan

Data riset menunjukkan bahwa para pengagum Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Habibie, Megawati, tetap konsisten memilih partai tokoh yang dikaguminya. Rekor terendah yakni pada pendukung Amien. Yakni dari 100 yang kagum pada Amien, 79 orang tetap setia memilih partai Amien (PAN) sedangkan yang tertinggi adalah Gus Dur, yakni dipilih oleh 95 dari 100 orang yang mengaguminya. Dari sini terlihat bahwa dalam sistem pemilu proporsional di Indonesia daya tarik tokoh nasional jauh lebih kuat ketimbang daya tarik tokoh lokal. Maka PK Sejahtera dengan keminiman tokoh besarnya harus *start* sejak dini, sehingga pada Pemilu 2004 paling tidak tokoh nasional PK Sejahtera bisa mendekati kebesaran tokoh-tokoh nasional di atas.

Untuk kemunculan tokoh nasional memang lebih merupakan tanggungjawab kerja di tingkat DPP. Sementara dalam konteks ini tugas DPW dan DPD adalah merancang dan mengorbitkan tokoh-tokoh lokal mereka dari segala bidangnya. Bisa muncul dari sisi kepartaian, dakwah, ekonomi/bisnis professional, ormas, LSM, dan lain-lain.

---

<sup>35</sup> Dikutip dari Lainah Pemenangan Pemilu 2004 Partai Keadilan sejahtera.

b. Kader

Kader disini sebagai orang internal partai dimana mereka adalah anggota aktif yang melaksanakan tugas-tugas kepartaian. Selain partisipan dan masyarakat umum sebagai target penarikan massa. Peran Kader yang solid sangat dibutuhkan oleh Partai dimana dari kader inilah suatu tokoh terlahir.

c. Jaringan & massa

Sejauh ini belum didapatkan hasil riset pemilu yang menjelaskan kaitan langsung antara hubungan antara keluasan jaringan sebuah partai, dengan keberhasilan meraih konstituen. PK Sejahtera dengan jaringannya yang cukup merata di seluruh Indonesia, dengan kadernya yang terdidik dan sangat militan, seharusnya menggunakan logika jaringan ini untuk menjaring sebanyak-banyaknya massa. Jaringan PK Sejahtera yang dimaksud tidak terbatas hanya dalam bentuk struktur formal seperti DPP hingga DPRa. Ini tak cukup. Tapi jaring PK Sejahtera adalah pada setiap kadernya misalnya kader PK Sejahtera adalah para pemilih PKS pada pemilu 99 dan berdasarkan data riset- mengaku terlibat dalam kerja keorganisasian partai, maka jumlah ereka adalah 18,2% dari  $\pm$  1,4 juta pemilih. Atau kira-kira jumlah mereka adalah 254.800 kader seluruh Indonesia.

d. Opini & Media

Opini khalayak tersalurkan melalui media dimana Media dapat memperbesar suatu yang kecil, dan sebaliknya memperkecil suatu yang

besar. Demonstrasi sejumlah kecil orang bisa menjadi isu besar sebaliknya demonstrasi yang besar, bisa dikecilkan artinya. Ketokohan seseorang atau kelompok juga bisa “dikontrol” sangat cepat melalui media. Sebaliknya *character assassination* (pembunuhan citra) diri dan kelompok juga bisa direkayasa. Media bisa melakukan masalisasi kebaikan dan keburukan pada saat yang sama. Di sinilah pentingnya memanfaatkan media massa untuk kepentingan dakwah dan jihad.

Watak media adalah senang dengan sensasi. Gemar dengan kontroversi. Haus dengan isu. Gandrung kepada orang dan kelompok yang tidak umum (fisik, perkataan, buah fikiran, watak, kreasi, karya, dan lain-lain) baik dalam arti positif maupun negatif. Salah satu contoh Nilai jual PKS di hadapan media adalah :

1. Partai anak muda/i
2. Partai kampus dan terdidik.
3. Partai jilbabers
4. Partai aktivis masjid
5. Partai ke-7 terbesar hasil pemilu 99
6. Partai yang “mentrinya dan sekjen mentrinya” (Menhutbun dan Sekjen Menhutbun) berhasil “memenjarakan” Bob Hasan “si raja hutan”
7. Partai yang anggota dewannya secara umum bebas dari isu suap
8. Partai yang sangat tertib ketika demo dan kampanye.
9. Partai yang bersih dari noda Orba

10. Partai yang sangat solid ke dalam, jauh dari bahaya perpecahan fungsionaris.

11. Partai yang mayoritas anggota legislatifnya bersih dari praktek korupsi.

e. Dana & Atribut<sup>36</sup>.

Keterbatasan Sumber dana serta atribut menjadi permasalahan vital dalam partai yang menentukan berlangsungnya kegiatan partai.

#### **b. Agen-agen Komunikasi Politik**

Seperti bentuk-bentuk komunikasi yang lain, komunikasi politik berlangsung sebagai suatu proses penyampaian pesan-pesan tertentu yang berasal dari sumber (selaku pihak yang memprakarsai komunikasi) kepada khalayak, dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah tertentu pula. Unsur-unsur tersebutlah yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunikasi politik dalam suatu kegiatan komunikasi politik dalam suatu masyarakat. Sekalipun keluaran (*output*) komunikasi politik pada akhirnya ditentukan oleh semua unsure tersebut secara keseluruhan, namun suatu analisis yang tersendiri terhadap masing-masing unsur perlu juga dilakukan.

Analisis yang dimaksud berguna untuk mengenali lebih jauh mengenai peran setiap unsur agar pemahaman yang menyeluruh terhadap proses komunikasi politik dapat dicapai lebih baik. Bila telah berkembang, isi politik membantu berhubungan dengan politik dengan cara yakni : *Pertama*, mengungkapkan identitas personal sebagai warga negara yang sesuai atau berbeda pendapatnya, anggota kelompok dan atau partai politik, sebagai pemimpin, pengikut atau bukan pengikut dan sebagainya.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ilyas Sunnah, s.s

*Kedua*, mengevaluasi objek politik, menerima atau menolak pemimpin politik, kelompok, partai, kebijakan dan autoritas. *Ketiga*, memahami bahwa mencapai tujuan nyata dengan cara instrumental dengan mempengaruhi pemerintah adalah yang terbaik. Ketiga fungsi dari politik ini adalah mengungkapkan, mempertimbangkan, menolong. Sama dengan cara orang menggunakan lambang dalam politik.

Isi itu diturunkan dari partisipasi seseorang dalam komunikasi interpersonal, organisasi, dan massa.

#### **Sosialisasi isi komunikasi interpersonal**

Ada dua saluran utama komunikasi interpersonal yang membantu belajar politik, yaitu keluarga dan lingkungan yang terdiri atas kawan-kawan dekat dan akrab yang dikenal sebagai sebaya. Kebijaksanaan konvensional pernah mengatakan bahwa tetap merupakan fakta yang tak diragukan bahwa keluarga adalah lembaga sosial primer disemua negeri. Sebagai kesimpulan umum ialah bahwa keluarga adalah sumber terpenting bagi belajar politik. Hal ini ditunjang oleh temuan tentang banyaknya kesamaan diantara orientasi politik orang tua dan anaknya. Namun riset akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pembahasan yang lalu tentang belajar politik seringkali terlalu berlebihan menilai bagian yang dimainkan oleh kelompok sebaya dan media massa<sup>37</sup>.

Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi diantara seseorang dengan paling kurang seseorang lainnya atau biasanya diantara dua orang yang dapat langsung diketahui balikkannya. Dengan bertambahnya orang yang terlibat



dalam komunikasi, menjadi bertambahlah persepsi orang dalam kejadian komunikasi sehingga bertambah komplekslah komunikasi tersebut. Komunikasi interpersonal adalah membentuk hubungan dengan orang lain<sup>38</sup>.

### **Sosialisasi isi komunikasi organisasi.**

Organisasi terpenting yang dimaksud mempengaruhi belajar politik sejak dini ialah sekolah. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolahnya, orang boleh jadi menjadi anggota berbagai organisasi-lembaga keagamaan, partai politik, kelompok kewarganegaraan, golongan yang berpengaruh dan kelompok kerja, yang semuanya mempengaruhi belajar politik pada masa dewasa. Namun konsekuensi yang tepat dari saluran organisasi setelah tahun-tahun sekolah merupakan subyek yang relative sedikit diriset<sup>39</sup>.

Dari bermacam-macam persepsi mengenai komunikasi organisasi dapat disimpulkan :

- Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal maupun eksternal.
- Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya tujuan, arah dan media.
- Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, hubungannya dan keterampilan/skil<sup>40</sup>.

### **Sosialisasi isi komunikasi massa**

---

<sup>37</sup> Dan nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 110.

<sup>38</sup> Muhammad Arni. Dr, *komunikasi Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 159.

<sup>39</sup> Dan nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal 114.

<sup>40</sup> Muhammad Arni. Dr, *Komunikasi Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal.67.

Studi tentang komunikasi massa termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan yang lebih luas yang berkenaan dengan komunikasi manusia. Bidang ilmu pengetahuan tersebut kadangkala disebut ilmu pengetahuan komunikasi. Bidang ilmu pengetahuan tersebut kadangkala disebut ilmu pengetahuan komunikasi. Bidang ilmu pengetahuan yang luas tersebut dapat dibagi menurut beberapa cara pembagian, salah satu diantaranya ialah berdasarkan peringkat organisasi sosial yang merupakan tempat berlangsungnya komunikasi.

Komunikasi massa merupakan salah satu proses komunikasi yang berlangsung pada peringkat masyarakat luas, yang identifikasinya ditentukan oleh ciri khas institusionalnya (gabungan antara tujuan, organisasi, dan kegiatan yang sebenarnya). Proses lain yang kedudukannya hamper sama dalam pengertian ruang lingkup dan keberadaannya yang muncul dimana-mana adalah pemerintahan, pendidikan, dan agama. Masing-masing memiliki jaringan institusional tersendiri yang kadangkala sangat banyak berkaitan dalam proses transmisi atau tukar-menukar informasi dan gagasan. Terlepas dari hal itu, dewasa ini komunikasi massa makin lebih banyak melibatkan orang untuk waktu yang lebih banyak pula meskipun intensitasnya lebih rendah.

Karakteristik saluran komunikasi massa termasuk kegiatan media massa dalam melakukan beberapa hal, membantu menyusun agenda pokok masalah untuk perdebatan public, menetapkan konteks untuk penilaian rakyat tentang kejadian, mengubah kejadian menjadi peristiwa, mempengaruhi pengharapan rakyat tentang bagaimana akhirnya peristiwa itu, dan dengan berbagai cara melukiskan citra tentang

pemimpin politik. Kita akan menelaah konsekuensi dari yang dilakukan oleh kampanye persuasive melalui media massa untuk mengubah opini.

Beberapa ciri-ciri khusus komunikasi massa oleh Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A yaitu:<sup>41</sup>

1. Komunikasi massa berlangsung satu arah.

Berbeda dengan *komunikasi antarpersona (interpersonal communication)* yang berlangsung dua arah (*two-way traffic communication*), komunikasi massa berlangsung satu arah (*one-way communication*). Ini berarti bahwa tidak terdapat arus balik dari komunikan kepada komunikator. Dengan lain perkataan, wartawan sebagai komunikator tidak mengetahui tanggapan para pembacanya terhadap pesan atau berita yang disiarkannya itu. Demikian pula penyiar televisi, atau sutradara film tidak mengetahui tanggapan khalayak yang dijadikan sasarannya. Yang dimaksudkan dengan "tidak mengetahui" dalam keterangan diatas ialah tidak mengetahui pada waktu proses komunikasi itu berlangsung. Oleh karena itu, seperti telah biasa terjadi pada komunikasi tatap muka. Oleh karena itu, arus balik seperti itu dinamakan arus balik tertunda (*delayed feedback*). Dan walaupun terjadi arus balik seperti itu, maka terjadinya jarang sekali.

Sebagai konsekuensi dari situasi komunikasi seperti itu, komunikator pada komunikasi massa harus melakukan perencanaan dan persiapan sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan kepada komunikan harus *komunikatif* dalam arti kata dapat diterima *secara inderawi (received)* dan *secara rohani (accepted)* pada satu kali penyiaran. Dengan demikian pesan komunikasi selain harus jelas dapat

dibaca – kalau salurannya media cetak – dan jelas dapat didengar – bila salurannya media elektronik – juga dapat dipahami maknanya seraya tidak bertentangan dengan kebudayaan komunikasi yang menjadi sasaran komunikasi.

## 2. Komunikator pada komunikasi massa melembaga

Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. Oleh karena itu, komunikatornya melembaga atau dalam bahasa asing disebut *institutionalized communicator* atau *organized communicator*

Komunikator pada komunikasi massa, misalnya wartawan surat kabar atau penyiar televisi – karena media yang dipergunakannya adalah suatu lembaga dalam menyebarkan pesan komunikasinya bertindak atas nama lembaga, sejalan dengan kebijaksanaan (*policy*) surat kabar dan stasiun televisi yang diwakilinya. Ia tidak mempunyai kebebasan individual.

Sebagai konsekuensi dari sifat komunikator yang melembaga itu, peranannya dalam proses komunikasi ditunjang oleh orang-orang lain. Kemunculannya dalam media komunikasi tidak sendirian, tetapi bersama orang lain. Tulisan seorang wartawan surat kabar, misalnya, tidak mungkin dapat dibaca khalayak apabila tidak didukung oleh pekerjaan redaktur pelaksana (*managing editor*), juru tata letak (*layout man*), korektor, dan lain-lain. Wajah dan suara penyiar televisi tak mungkin dapat dilihat dan didengar jika tidak ditunjang oleh pekerjaan pengarah acara, jurukamera, jurusuar, dan sebagainya.

---

<sup>41</sup> Prof. Drs. Onong Uchjana E, M.A., *Ilmu Komunikasi: teori dan praktek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal.22-26.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, komunikator pada komunikasi massa dinamakan juga *komunikator kolektif (collective communicator)* karena tersebarinya pesan komunikasi massa merupakan hasil kerjasama sejumlah kerabat kerja. Karena sifatnya kolektif, maka komunikator yang terdiri atas sejumlah kerabat kerja itu mutlak harus mempunyai keterampilan yang tinggi dalam bidangnya masing-masing. Dengan demikian, komunikasi sekunder sebagai kelanjutan dari komunikasi primer itu akan berjalan sempurna.

3. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum

Pesan yang disebarakan melalui media massa bersifat umum (*public*) karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Jadi tidak ditujukan kepada perseorangan atau kepada sekelompok orang tertentu.

Hal itulah yang antara lain membedakan media massa dengan media *nirmassa*. Surat, telepon, telegram, dan teleks misalnya, adalah media *nirmassa*, bukan media massa, karena ditujukan kepada orang tertentu. Demikian pula majalah organisasi, surat kabar kampus, radio telegrafi atau radio *citizen band*, film dokumenter, dan televisi siaran sekitar (*closed circuit television*) bukanlah media massa, melainkan media *nirmassa* karena ditujukan kepada sekelompok orang tertentu. Media massa tidak akan menyiarkan suatu pesan yang tidak menyangkut kepentingan umum. Media massa akan menyiarkan berita mengenai seorang menteri yang meresmikan sebuah proyek pembangunan, tetapi tidak akan menyiarkan berita seorang menteri yang menyelenggarakan khitanan putranya.

4. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan

Ciri lain dari media massa adalah kemampuannya untuk menimbulkan

keserempakan (simultaneity) pada pihak khalayak dalam menerima pesan – pesan yang disebarkan. Hal inilah yang merupakan ciri paling hakiki dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. Pada umumnya yang termasuk ke dalam media massa adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film yang mengandung ciri keserempakan.

Radio dan televisi, karena merupakan media massa elektronik, tidak diragukan lagi keserempakannya ketika khalayak mendengarkan acara radio atau menonton acara televisi. Demikian pula majalah di Negara-negara maju dianggap media massa karena cirri keserempakan tersebut, misalnya di Amerika Serikat juga yang mempunyai *Times* dan *Reader's Digest* yang berolah jutaan eksemplar. Bahkan di Negara Uncle Sam itu buku dianggap media massa karena tidak sedikit yang sekali terbit berjumlah 20.000.000 sampai 30.000.000 buah. Film mengandung cirri keserempakan jelas tampak ketika ia yang dibuat dalam ratusan kopi diputar di gedung-gedung bioskop di mana secara serempak ditonton oleh ribuan pengunjung.

##### 5. Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen

Komunikasi atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran yang dituju komunikator bersifat heterogen. Dalam keberadaannya secara terpencar-pencar, dimana satu sama lainnya tidak saling mengenal dan tidak memiliki kontak pribadi, masing-masing berbeda dalam berbagai hal: jenis kelamin, usia, agama, ideology, pekerjaan, pendidikan, pengalaman, kebudayaan, pandangan hidup, keinginan, cita-cita, dan sebagainya. Heterogenitas khalayak seperti itulah yang menjadi kesulitan seorang komunikator dalam menyebarkan pesannya melalui media massa karena

setiap individu dari khalayak itu menghendaki agar keinginannya dipenuhi. Bagi para pengelola media massa adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk memenuhinya. Satu-satunya cara untuk dapat mendekati keinginan seluruh khalayak sepenuhnya ialah dengan mengelompokkan mereka menurut jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan, pendidikan, kebudayaan, kesenangan (hobby), dan lain-lain berdasarkan perbedaan.

Berdasarkan pengelompokan tersebut di atas maka sejumlah rubric atau acara diperuntukkan bagi kelompok tertentu sebagai sasarannya, atau dapat disingkat *kelompok sasaran (target group)*, disamping khalayak keseluruhan sebagai sasarannya atau yang disebut *khalayak sasaran (target audience)*. Contoh rubric untuk khalayak sasaran pada surat kabar adalah berita, tahuk rencana, pojok, artikel, cerita bersambung, dan lain-lain, sedangkan untuk kelompok sasaran adalah ruangan wanita, halaman untuk anak-anak, kolom untuk mahasiswa, ruangan bagi penggemar film, dan sebagainya. Contoh acara untuk khalayak sasaran pada radio dan televisi siaran adalah warta berita, sandiwara, film seri, musik nasional (keroncong, dangdut, populer, dan lain-lain), olah raga, dan sebagainya, sedangkan untuk kelompok sasaran adalah acara untuk anak-anak, remaja, mahasiswa, petani, ABRI, pemeluk agama Islam dan agama-agama lainnya, serta banyak lagi yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu.

Berdasarkan ciri heterogenitas komunikasi sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan ciri yang disebut pertama, yakni bahwa komunikasi massa berlangsung satu arah, maka komunikator yang menangani atau yang menggunakan media massa harus melakukan perencanaan yang matang sehingga pesan yang

disebarkannya benar-benar komunikatif, yakni *received* dan *accepted* dalam suatu kali penyiaran, sebagaimana dipaparkan di muka.

### c. Tujuan Komunikasi Politik

Komunikasi Politik seperti halnya komunikasi pada umumnya memiliki beberapa tujuan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila sebagai pejabat atau pimpinan maka kita sering berhubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini kita bertujuan untuk menyampaikan informasi dan mencari informasi kepada mereka, agar apa yang ingin kita sampaikan atau kita minta dapat dimengerti, sehingga komunikasi itu yang kita laksanakan dapat tercapai.

Pada umumnya komunikasi dapat mempunyai beberapa tujuan antara lain :<sup>42</sup>

1. Supaya yang kita sampaikan itu dapat dimengerti sebagai komunikator kita harus menjelaskan kepada komunikan (penerima) dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti dan mengikuti apa yang kita maksudkan.
2. Memahami orang lain  
Sebagai komunikator harus mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan, jangan mereka menginginkan kemauannya.
3. Supaya gagasan dapat diterima orang lain  
Berusaha agar gagasan dapat diterima orang lain dengan pendekatan yang persuasive bukan memaksakan kehendak.

---

<sup>42</sup> A.W. Widjaja, *Ilmu Komunikasi pengantar studi*, PT Bina Aksara, Jakarta, hal. 62.



4. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu

Menggerakkan sesuatu itu dapat bermacam-macam, mungkin berupa kegiatan. Kegiatan yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang lebih banyak mendorong, namun yang penting harus diingat adalah bagaimana cara yang baik untuk melakukannya.

Tujuan komunikasi berikutnya adalah :

1. Mengubah sikap (to change the attitude)
2. Mengubah opini/pendapat/pandangan (to change the opinion)
3. Mengubah perilaku (to change the behavior)
4. Mengubah masyarakat (to change the society)<sup>43</sup>

**D. Definisi Konsepsional**

Konsep merupakan unsur yang penting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstraksi fenomena tertentu yang diperoleh dengan melakukan generalisasi dari kelompok fenomena tertentu yang sama<sup>44</sup>. Dengan demikian definisi konsepsional adalah definisi yang menggambarkan suatu abstraksi dari hal-hal yang perlu diamati. Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah :

1. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok ini berusaha untuk mendapatkan kekuatan politik dan merebut kedudukan dengan

<sup>43</sup> Onong Uchjana Effendy, M.A, *Ilmu, teori dan filsafat komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 55.

<sup>44</sup> A.W. Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, hal.94.

cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan mereka di dalam system politik yang berlaku.

2. Fungsi partai politik adalah mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik.
3. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat, dan dimaksudkan untuk melakukan siapa yang akan memegang pemerintahan Negara dalam jangka waktu tertentu dan sekaligus merupakan kesempatan untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan warga negara terhadap pemerintahan guna mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan tujuan memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga legislative, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, membangun Negara, dan mempertahankan keutuhan Negara.
4. Komunikasi politik adalah segala komunikasi yang terjadi dalam suatu system politik dan antara system tersebut dengan lingkungannya, cakupannya meliputi studi mengenai jaringan komunikasi (*individu, organisasi, kelompok, media massa dan saluran-saluran khusus*)
5. Proses komunikasi politik adalah penyampaian pesan-pesan tertentu yang bernuansa politik yang berasal dari sumber (*selaku pihak yang memprakarsai komunikasi*) kepada khalayak dengan menggunakan media tertentu untuk

mencapai suatu tujuan tertentu pula. Pada setiap peristiwa komunikasi terdapat komponen yang memungkinkan berlangsungnya suatu proses komunikasi yakni :

- a. Komunikator
- b. Pesan / Informasi
- c. Saluran / Media
- a. Komunikan
- b. Efek

#### **E. Definisi Operasional**

Yang dimaksud operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel. Agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya maka perlu dioperasionalkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

##### **1. Proses komunikasi politik DPW PKS DIY**

- a. Komunikator
  - 1). Individual
  - 2). Kolektif
- b. Pesan / informasi
  - 1) Jati diri Partai Keadilan Sejahtera
  - 2) Target Pemilu 2004
  - 3) Distribusi beban rekrutmen Pendirian DPC

- 4) Sistem pelayanan konstituen, Pelayanan yang diberikan partai,  
Koordinator dan mekanisme permintaan pelayanan partai
- 5) Teknik Fundrising (Penggalangan dana)
- 6) Press tour (Kunjungan Media)
- 7) Pola rekrutmen dan syarat caleg
- 8) Strategi dan Pelaksanaan kampanye
- c. Saluran / Media
  - 1) Komunikasi tatap muka
  - 2) Komunikasi dengan perantara, antara lain dengan perantara ditempatkan diantara komunikator dan komunikan, disini adalah media, teknologi, sarana dan alat komunikasi lainnya turut serta.
- d. Komunikan (*audience*)
  - 1). Jajaran dan anggota-anggota DPW PKS (Internal Partai)
  - 2). Masyarakat umum (Eksternal Partai)
- e. Efek dengan Umpan balik (*feed-back*)
  - 1). Positif, atau
  - 2). Negatif
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi proses komunikasi
  - a. Penokohan
  - b. Kader
  - c. Jaringan & massa
  - d. Opini & Media
  - e. Dana & Atribut

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- Untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi politik di DPW PKS DIY.
- Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses komunikasi politik di DPW PKS DIY baik pendukung atau penghambat.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi di bidang ilmu sosial dan ilmu politik serta pemerintahan khususnya mengenai Fungsi Partai Politik sebagai sarana Komunikasi Politik.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi partai politik sebagai pendukung dalam rangka melaksanakan pembangunan dibidang politik agar dapat berhasil sesuai dengan tujuan.

### **3. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Seperti yang dikemukakan oleh "Winarno Surahmat" yang memberikan definisi tentang penelitian deskriptif, yakni sebagai berikut :

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menurunkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan

kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang berlangsung, kecenderungan yang nampak dan pertantangan yang meruncing atau kelainan yang muncul.

#### **4. Unit Analisis**

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah : Dewan Pimpinan Wilayah (DPW PKS DIY) oleh karena itu data diperoleh dari sumber data. Dengan responden diantaranya :

- Ketua DPW PKS Yogyakarta
- Wakil sekretaris I bagian administrasi umum DPW PKS Yogyakarta

#### **5. Jenis Data**

Data primer adalah data yang secara langsung berasal dari responden, dalam hal ini melalui beberapa individu yang duduk sebagai pengurus dan masih aktif di DPW PKS DIY guna mendapatkan informasi mengenai peran partai politik.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, media massa, makalah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan suatu data yang berhubungan langsung dengan judul skripsi ini, khususnya mengenai hipotesis yang

di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yakni :

1) Teknik Dokumentasi

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul ini.

2) Teknik Wawancara

Upaya mendapatkan informasi dengan cara bertanya kepada tokoh-tokoh yang duduk di jajaran DPW PKS DIY maupun ketua DPW PKS DIY serta kepada anggota maupun staf yang terlibat dalam jajaran DPW PKS DIY.

## 7. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu :

1) Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pengukuran, dan abstraksi data kasar yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses penelitian.

2) Sajian Data

Merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan dapat dilakukan. Dengan melihat sesuatu penyajian data, peneliti akan mengerti tentang apa yang terjadi serta memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

3) Penarikan Kesimpulan

Dari sajian data yang telah tersusun selanjutnya peneliti dapat menarik suatu kesimpulan akhir<sup>45</sup>.